

**PIDATO PERNYATAAN TAHUNAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
DR. R.M. MARTY M. NATALEGAWA**

Jakarta, 7 Januari 2011

=====

Yang kami hormati, Bapak Dr. Alwi Shihab, Menteri Luar Negeri RI periode 1999 – 2001,

Yang kami hormati, Bapak Dr. N. Hassan Wirajuda, Menteri Luar Negeri RI periode 2001 – 2009,

Yang kami hormati, Bapak Sidharto Danusubroto, Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen

Yang kami hormati, rekan-rekan pers, para duta besar Negara sahabat, para undangan, dan seluruh jajaran pimpinan Kementerian Luar Negeri,

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih tetap diberikan kesempatan untuk melanjutkan darma bakti kita kepada negara yang kita cintai ini.

Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami atas nama pribadi, dan atas nama segenap jajaran Kementerian Luar Negeri dan seluruh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, untuk menyampaikan Selamat Tahun Baru 2011 kepada hadirin.

Adalah merupakan kebahagiaan bagi kami secara pribadi dan bagi kita semua, bahwasanya ditengah-tengah kita saat ini hadir para sesepuh dan senior kami di Kementerian Luar Negeri dan para generasi mendatang Kemlu.

Hadirin yang saya hormati

Memasuki awal tahun dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, pertama-tama izinkan kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang mendalam atas seluruh kepedulian dan dukungan yang diberikan selama tahun 2010.

Sebagaimana yang telah kami tekankan dalam pernyataan di awal tahun 2010 yang lalu, kebijakan politik luar negeri, terlebih dalam era demokrasi di Indonesia saat ini, harus ditopang oleh rasa kepemilikan dan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan.

Untuk menjamin efektifitas kebijakan politik luar negeri, partisipasi dan kepemilikan seluruh pemangku kepentingan merupakan suatu keniscayaan.

Pada tahun 2011, Kementerian Luar Negeri memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan upaya menjangkau seluruh elemen masyarakat, antara lain melalui program diplomasi publik dan diseminasi informasi.

Untuk membangun dan memperkuat konstituen politik luar negeri, khususnya di kalangan pemuda sebagai generasi masa depan.

Hadirin yang kami hormati,

Kita memulai pelaksanaan politik luar negeri di tahun baru ini dengan komitmen, niat dan kesungguhan yang kuat.

Bukan hanya untuk melanjutkan dan meningkatkan hasil yang telah dicapai pada tahun lalu, namun juga mengidentifikasi peluang-peluang dan kemungkinan-kemungkinan baru.

- Untuk menjalankan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam lingkungan regional dan global yang semakin kompleks;
- Agar Indonesia tidak hanya dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, melainkan juga dapat terus maju dan berkembang dalam konstelasi geopolitik yang baru dan kompleks;
- Untuk mempertahankan kepentingan nasional Indonesia; keamanan dan kemakmuran Indonesia.
- Dan juga untuk berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas internasional.

Sesungguhnya, perkembangan yang terjadi pada tahun 2010 menguatkan beberapa kenyataan yang telah kita antisipasi secara bersama, yaitu bahwa

Tantangan abad ke-21 tidak dapat diselesaikan oleh satu Negara secara sendiri, melainkan menuntut adanya kerjasama dan kemitraan di antara Negara- yang terkadang telah mengaburkan perbedaan antara apa yang disebut sebagai isu nasional, regional ataupun global;

Tantangan yang saling terkait antara satu dengan yang lain, dimana solusi terhadap sesuatu isu memiliki dampak bagi yang lainnya, sehingga menuntut adanya upaya penyelesaian masalah secara komprehensif.

Hadirin yang kami hormati,

Tahun 2010, tentunya, tetap meninggalkan beban berat berupa berbagai tantangan yang bersifat lintas batas yang dihadapi masyarakat internasional.

Pembangunan, perubahan iklim, krisis keuangan global, pangan dan energi, serta masalah kesehatan dan bencana alam adalah contoh nyata yang terus menerus menjadi tantangan bagi seluruh negara, baik Negara maju maupun berkembang.

Kejahatan lintas batas yang terorganisir seperti terorisme, penyelundupan manusia, dan korupsi akan terus menjadi ancaman.

Mengingat seluruh tantangan tersebut membutuhkan kerjasama antar negara untuk mengatasinya, maka kesemuanya itu memiliki dimensi kebijakan politik luar negeri.

Oleh karenanya, diplomasi dapat memberikan kontribusi.

Mengatasi tantangan dan bahkan menciptakan peluang.

Hal ini sesungguhnya berlaku pada pelaksanaan politik luar negeri Indonesia sepanjang tahun 2010.

Dalam menghadapi berbagai isu internasional tersebut, politik luar negeri Indonesia, tidak dapat dan tidak akan pernah tertinggal.

Dengan pendekatan yang prinsipil, visioner, namun pragmatis, polugri akan senantiasa secara aktif mengupayakan solusi, menjembatani kesepahaman dan mendorong adanya konsensus.

Hadirin yang saya hormati,

Pada awal tahun 2010, kita berkomitmen untuk secara aktif berupaya meningkatkan ke tataran yang lebih tinggi hubungan yang telah terjalin dengan negara-negara di seluruh penjuru dunia – Asia Pasifik, Afrika, Eropa dan Amerika.

Sepanjang tahun 2010, kita telah memfokuskan upaya merevitalisasi dan lebih mengoptimalkan mekanisme hubungan bilateral dengan berbagai negara; untuk meninjau seluruh aspek hubungan bilateral secara komprehensif dan mengidentifikasi peluang-peluang baru.

Mekanisme *score card* hubungan bilateral dilakukan untuk memastikan adanya perkembangan dan kemajuan dalam hubungan bilateral antara Indonesia dengan berbagai negara.

Dengan Malaysia misalnya, mekanisme Komisi Bilateral tingkat Menteri Luar Negeri telah dihidupkan kembali setelah pertemuan terakhir pada tahun 2004. Pada perkembangannya, dalam 6 bulan terakhir telah dilakukan setidaknya 4 kali pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri antara kedua negara. Selain itu, terdapat konsultasi tahunan pada tingkat Kepala Negara/Pemerintahan untuk mengkaji perkembangan hubungan bilateral kedua negara.

Dengan Singapura, Indonesia telah menetapkan adanya mekanisme pertemuan reguler pada tingkat Menteri Luar Negeri, baik secara formal maupun informal, setiap enam bulan sekali. Pada tingkat Kepala Negara/Pemerintahan, Kedua Kepala Pemerintahan bertemu dalam format *leaders' retreat* setiap tahun.

Pada tahun 2010, Komisi Bersama tingkat Menteri juga telah dihidupkan kembali dengan Thailand, Papua Nugini, Timor Leste, dan Selandia Baru, dimana Komisi Bersama dengan masing-masing negara tersebut terakhir dilakukan pada tahun 2007, 2003, 2005 dan 2008.

Dengan Australia, pada tahun 2010 i disepakati pula pertemuan tahunan tingkat Kepala Negara/Pemerintahan dalam bentuk *Annual Leaders' Dialogue*. Terdapat pula forum tingkat Menteri yang melibatkan Menlu dan Menhan kedua Negara, serta forum tahunan seluruh pemangku kepentingan hubungan Indonesia dan Australia.

Dengan Amerika Serikat, untuk pertama kalinya pada tahun 2010 telah dilakukan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri dalam format Komisi Bersama. Mekanisme ini akan menjadi forum tahunan yang secara komprehensif mengkaji hubungan kemitraan Indonesia-AS.

Kita terus mengembangkan bentuk kemitraan strategis dan komprehensif dalam hubungan bilateral antara Indonesia dengan Rusia, Tiongkok, India, Jepang dan Korea Selatan.

Negara kawasan Eropa, dan Uni Eropa khususnya, juga tidak luput dari perhatian Indonesia, sebagaimana tercerminkan dalam penandatanganan *Comprehensive Partnership Agreement* antara Indonesia dan Uni Eropa. Latar belakang sejarah serta potensi hubungan antara Indonesia dan Afrika serta Amerika Selatan juga terus dikembangkan sehingga semakin relevan dalam era masa kini.

Tidak kalah penting, politik luar negeri sepanjang 2010 semakin menitikberatkan pentingnya kawasan Pasifik dengan memperdalam hubungan, baik dengan negara yang bertetangga langsung seperti Timor Leste dan Papua Nugini, maupun di kawasan yang lebih luas seperti Selandia Baru dan Negara pasifik lainnya.

Hadirin yang kami hormati,

Upaya untuk memajukan berbagai aspek hubungan bilateral dengan negara sahabat juga tercerminkan dalam 121 perjanjian baik, dalam bentuk MOU maupun *agreement* dengan 44 negara, yang telah dicapai sepanjang tahun 2010.

Pada tahun 2010 ini pula, Indonesia telah membuka 10 perwakilan Republik Indonesia di negara sahabat dan 1 Perwakilan Tetap RI untuk ASEAN di Jakarta. Sebaliknya, Indonesia juga telah menerima rencana sejumlah negara sahabat untuk membuka perwakilan diplomatiknya di Jakarta.

Pada tahun 2011, kita akan melakukan konsolidasi dan semakin memperdalam hubungan bilateral dengan berbagai negara.

Berlandaskan pada hubungan persahabatan yang telah terjalin selama ini, terutama di bidang politik, maka fokus utama akan diberikan pada upaya meningkatkan hubungan antar-masyarakat dan mempertajam diplomasi ekonomi yang akan memberi kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.

Selain itu, pada tahun 2011, Pemerintah RI, sesuai prosedur yang ada, merencanakan untuk memulai proses pembukaan hubungan diplomatik dengan 21 negara anggota PBB. Tentunya, Indonesia selama ini telah menjalin kerjasama yang erat dengan negara-negara tersebut, terutama dalam kerangka multilateral. Dengan dibukanya hubungan diplomatik dengan ke-21 negara PBB dimaksud, maka Indonesia secara formal akan memiliki hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota PBB yang berjumlah 192 negara, kecuali Israel.

Hadirin yang terhormat,

Seiring dengan komitmen Indonesia untuk memperdalam dan memperluas hubungan bilateral dengan berbagai negara di seluruh penjuru dunia, komitmen Indonesia untuk memelihara perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasannya sendiri – Asia Tenggara sangat tinggi.

Pada awal tahun 2010, Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk senantiasa berkontribusi bagi terwujudnya Komunitas ASEAN pada tahun 2015 yang bertumpu pada 3 pilarnya secara paralel dan seimbang.

Sepanjang tahun 2010, Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan komitmen tersebut. Baik melalui pelaksanaan cetak biru Komunitas ASEAN dan Piagam ASEAN, maupun melalui langkah-langkah, tidak jarang melalui *quiet diplomacy*, untuk memastikan kawasan Asia Tenggara tetap ditandai oleh perdamaian dan hubungan persahabatan, sesuai prinsip yang terkandung dalam Treaty of Amity and Cooperation.

Demikian pula, sepanjang tahun 2010, Indonesia memberikan kontribusi nyata dan secara proaktif terhadap pembahasan mengenai pembentukan tatanan kawasan (*regional architecture building*) sehingga ASEAN dapat secara nyata mewujudkan prinsip ASEAN sebagai penggerak utama (*ASEAN as a driving force*). Penambahan keanggotaan East Asia Summit, dengan diterimanya Federasi Rusia dan Amerika Serikat secara bersamaan, merupakan salah satu wujud nyata hasil upaya tersebut.

Bagi Indonesia, kesemuanya ini bertujuan untuk memastikan terus dipeliharanya kondisi di kawasan yang damai dan stabil; keamanan untuk semua (common security) dan kemakmuran untuk semua (common prosperity) suatu kondisi yang kita namakan "*dynamic equilibrium*".

Hadirin yang terhormat,

Sebagaimana yang telah dimaklumi bersama, didasari oleh keinginan untuk mengkonsolidasikan posisi sentral ASEAN terhadap berbagai dinamika yang berkembang cepat di kawasan, Indonesia telah memperoleh dukungan untuk mengubah giliran keketuaannya menjadi di tahun 2011.

Sebagai Ketua ASEAN, yang juga berusaha senantiasa menunjukkan kepemimpinan. Bukan saja dalam memastikan kemajuan dalam pencapaian Komunitas ASEAN 2015, melainkan juga dalam menggulirkan visi ASEAN pasca 2015 selaras dengan tema "ASEAN Community in a global community of nations".

Sehubungan dengan itu, dalam masa Keketuaan tahun 2011, Indonesia telah mengidentifikasi antara lain 3 prioritas yang mendasar yaitu:

Pertama, memastikan bahwa tahun 2011 akan ditandai oleh kemajuan yang signifikan dalam pencapaian Komunitas ASEAN.

Hal ini mencakup upaya untuk mengkonsolidasi dan mengintensifkan berbagai bentuk kerjasama di bawah 3 pilar ASEAN yang sudah berjalan selama ini.

Namun, disamping itu, bersama dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia juga akan mengidentifikasi bidang kerjasama lainnya yang memerlukan perhatian khusus berdasarkan tantangan dan peluang dewasa ini dan di masa mendatang.

Sebagai contoh, Indonesia mengharapkan pada tahun 2011, Komisi HAM ASEAN akan lebih efektif dalam memenuhi mandatnya sebagai cerminan komitmen negara ASEAN pada penghormatan Hak Asasi Manusia.

Indonesia juga akan mengupayakan kemajuan dalam masalah perlindungan pekerja migran di kawasan.

Memperhatikan perkembangan akhir-akhir ini, Indonesia juga akan memberikan perhatian khusus pada isu kelautan, antara lain yang menyangkut masalah keamanan, lingkungan dan keselamatan pelayaran, termasuk melalui ASEAN Maritime Forum.

Kedua, selaku Ketua ASEAN, Indonesia akan memastikan terpeliharanya tatanan dan situasi di kawasan yang kondusif bagi upaya pencapaian pembangunan.

Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada awal tahun 2010, bagi Indonesia, suatu komunitas Asia Timur ataupun Asia Pasifik tidak dapat terwujud tanpa adanya Komunitas ASEAN sebagai fondasi utamanya.

Dalam hal ini, sepanjang tahun 2010, Indonesia telah berkontribusi dengan menunjukkan "*intellectual leadershipnya*" dalam pembahasan mengenai *regional architecture building*. Indonesia telah berperan aktif memastikan peran sentral ASEAN menyikapi berbagai inisiatif pengembangan arsitektur kawasan, termasuk melalui perluasan East Asia Summit.

Pada tahun 2011 ini, Indonesia akan terus melanjutkan kepemimpinannya dengan memantapkan agenda dan peran strategis *East Asia Summit*.

Indonesia berkeyakinan, *East Asia Summit* dapat menjadi forum utama tingkat Kepala Negara/Pemerintahan untuk membahas isu-isu strategis, baik pada tingkat global maupun kawasan.

Ketiga, selaku Ketua ASEAN, Indonesia akan menggulirkan pembahasan mengenai perlunya visi ASEAN pasca 2015, yaitu peran masyarakat ASEAN dalam masyarakat dunia (ASEAN Community in a global community of nations).

Sebuah masyarakat ASEAN yang memberikan kontribusi bagi penciptaan perdamaian dan keamanan dunia;

Masyarakat ASEAN yang mendorong pertumbuhan ekonomi dunia yang kuat, stabil, terbuka dan berimbang;

Masyarakat ASEAN yang turut serta dalam mendorong nilai demokrasi, HAM dan toleransi pada tingkat global.

Kesemuanya ini, dilakukan dengan mengupayakan dibangunnya suatu platform bersama ASEAN mengenai masalah-masalah global (ASEAN common platform on global issues). Hal ini tentu tidak dapat diciptakan dalam sekejap. Diperlukan visi, cetak biru dan road map yang tepat ke arah peran dan sikap ASEAN yang lebih kohesif dalam menghadapi masalah-masalah global. Sama seperti halnya ASEAN bergerak secara terencana ke arah ASEAN Community 2015, Indonesia mengharapkan adanya cetak biru serupa ke arah *ASEAN Community in a global community of nations*.

Melandasi ketiga prioritas utama di atas, maka Indonesia akan senantiasa mendorong agar ASEAN berkembang sebagai organisasi yang bersifat *people-centered*.

Hadirin yang kami hormati,

Pada tingkat global, sesuai dengan yang telah disampaikan pada awal tahun 2010, diplomasi Indonesia akan terus meningkatkan perannya untuk berkontribusi dalam mengatasi berbagai permasalahan global.

Indonesia sangat meyakini bahwa pendekatan multilateral dalam mengatasi permasalahan global merupakan keniscayaan.

Peran dan kontribusi Indonesia dilakukan melalui berbagai forum multilateral baik PBB, GNB, Kelompok 77, OKI, APEC, maupun G-20. Disamping itu, Indonesia juga aktif dalam berbagai forum kerjasama antar kawasan seperti ASEM (Asia dan Eropa), FEALAC (Asia dan Amerika Latin) maupun NAASP (Asia dan Afrika).

Sepanjang tahun 2010, Indonesia senantiasa konsisten untuk memperjuangkan kepentingan nasional, kepentingan negara berkembang dan kepentingan masyarakat global di forum PBB.

Dalam upaya untuk menciptakan keamanan dan perdamaian internasional, Indonesia sepanjang tahun 2010 senantiasa, misalnya, memainkan peran sentral dalam isu perlucutan senjata nuklir guna mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir.

Sebagai koordinator bidang perlucutan senjata dalam Gerakan Non Blok, Indonesia telah memainkan peran utama pada *NPT Review Conference* pada bulan Mei 2010, sehingga

konferensi tersebut dapat menghasilkan kesepakatan akhir. Hal ini berbeda dengan pertemuan tahun 2005, yang gagal menyepakati kesepakatan akhir karena tajamnya perbedaan pandangan antara negara pemilik senjata nuklir dan lainnya.

Keputusan Indonesia untuk memulai proses ratifikasi Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji coba Senjata Nuklir/CTBT telah mendapatkan sambutan sangat positif oleh masyarakat internasional.

Keputusan tersebut merupakan bagian momentum baru kearah “dunia tanpa senjata nuklir”.

Pada tahun 2011 ini, dengan komitmen bersama antara Pemerintah dan DPR, Indonesia Insya Allah dapat merampungkan proses ratifikasi tersebut dan akan mendorong berbagai pihak agar traktat CTBT tersebut dapat segera diimplementasikan.

Selain itu, pada tahun 2011 pula, Indonesia akan terus berperan aktif dalam beberapa agenda perlucutan senjata, antara lain pada konferensi kaji ulang Konvensi Senjata Biologi.

Dalam isu operasi pemeliharaan perdamaian, Indonesia aktif berkontribusi pada pengembangan konsep strategis penggelaran misi pemeliharaan perdamaian dunia. Indonesia terus mendorong peningkatan peran sipil atau White Helmet untuk mendukung berbagai program pembangunan dan rehabilitasi wilayah pasca konflik bersenjata. Namun hal ini dilakukan dengan senantiasa mengedepankan kepemilikan nasional negara terkait (national ownership).

Dalam upaya mendorong peningkatan peran kawasan Asia Tenggara dalam mendukung misi pemeliharaan perdamaian PBB, Indonesia telah menyelenggarakan Workshop mengenai “The Role of the United Nations in Multidimensional Peacekeeping and Post Conflict Peacebuilding: Towards an ASEAN perspective” di Jakarta, tanggal 29-30 Maret 2010.

Pada tahun 2011, Indonesia akan berupaya menjadi *hub* bagi jaringan *peacekeeping centers* di kawasan.

Sepanjang tahun 2010, Indonesia telah mengirim sejumlah 1785 personil di 7 Misi PBB sebagai cerminan komitmennya dalam pemeliharaan perdamaian dunia.

Dengan demikian, Indonesia merupakan salah satu dari 20 negara pengirim pasukan perdamaian PBB terbesar.

Peningkatan kontribusi pasukan Indonesia tidak hanya terlihat dalam jumlah personil, melainkan juga penambahan *performance unit*. Indonesia telah mengirimkan KRI Kaisiepo pada bulan Agustus 2010 untuk bergabung dalam *Maritime Task Force (MTF) UNIFIL*. Ini adalah partisipasi kedua setelah KRI Diponegoro yang bergabung dengan MTF pada bulan April-September 2009.

Kedepan, diplomasi Indonesia akan terus menampilkan kesiapan Indonesia meningkatkan kontribusinya dalam misi perdamaian PBB untuk menjadi sepuluh negara penyumbang terbesar pasukan PBB.

Hadirin yang terhormat,

Masih di bidang perdamaian dan keamanan internasional, Indonesia senantiasa berkomitmen untuk mendorong penyelesaian menyeluruh masalah Palestina berdasarkan resolusi PBB.

Aspirasi dan cita-cita rakyat Palestina merupakan aspirasi dan cita-cita rakyat Indonesia.

Pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat serta hidup berdampingan dengan Israel merupakan solusi menyeluruh konflik Palestina dan Israel yang berkepanjangan.

Sepanjang tahun 2010, Indonesia senantiasa memberikan dukungannya yang konkrit terhadap Palestina, melalui pengembangan kapasitas rakyat dan pemerintah Palestina.

Indonesia bukan saja secara bilateral memberikan bantuan *capacity building*, melainkan juga, menggalang dukungan Asia dan Afrika untuk maksud yang sama. Sejauh ini program pengembangan kapasitas telah diberikan kepada 1662 orang dari Palestina yang melibatkan 24 negara, termasuk pelatihan bagi para diplomat Palestina oleh Kemlu.

Sesuai dengan permintaan Presiden Mahmoud Abbas saat kunjungan kenegaraan ke Jakarta, Indonesia telah memprakarsai forum 4 negara untuk Palestina yang melibatkan 4 negara berkembang utama yaitu Indonesia, Brazil, India dan Afrika Selatan. Hal ini merupakan kali pertama 4 negara tersebut menyikapi sebuah isu sebagai satu kesatuan.

Dalam pertemuan yang diadakan disela-sela SMU PBB pada bulan September 2010 tersebut, keempat negara menunjukkan komitmen untuk berkontribusi nyata untuk mendorong proses perdamaian di Timur Tengah.

Pada tahun 2011 ini, Indonesia akan terus mendorong proses perdamaian antara Palestina dan Israel. Indonesia juga akan melanjutkan mobilisasi bantuan masyarakat internasional dalam pengembangan kapasitas kepada 10.000 orang Palestina sesuai target dalam 5 tahun.

Hadirin yang kami hormati,

Sepanjang tahun 2010, diplomasi Indonesia juga dilakukan untuk memastikan agenda pembangunan global tetap menjadi perhatian utama pada saat krisis multidimensional menerpa masyarakat internasional.

Di Markas Besar PBB di New York, pada tahun 2010 ini telah dilakukan pertemuan para pemimpin dunia untuk mengkaji kemajuan yang tercapai dalam implementasi Tujuan Pembangunan Milenium.

Indonesia bukan hanya secara aktif berkontribusi pada pertemuan tersebut, melainkan juga telah memprakarsai sebuah pertemuan tingkat Menteri kawasan Asia dan Pasifik di Jakarta guna mengkonsolidasikan posisi dan kepentingan negara di kawasan dan disampaikan hasilnya dalam pertemuan Tingkat Tinggi di New York.

Dalam pertemuan Tingkat Menteri kawasan Asia dan Pasifik, telah diidentifikasi hal-hal yang perlu terus didorong, baik pada level nasional, regional maupun global, untuk memastikan negara di kawasan Asia dan Pasifik dapat memenuhi target pencapaian MDGs pada tahun 2015.

Pada tahun 2011 ini, Indonesia akan senantiasa mendorong seluruh pihak, baik mitra pembangunan dari negara maju dan organisasi internasional, termasuk lembaga keuangan

internasional, agar dapat bekerjasama untuk memastikan target pencapaian MDGs di tingkat nasional dapat tercapai.

Indonesia juga akan senantiasa mendorong terjalinnya kemitraan strategis dan situasi yang kondusif untuk mencapai pembangunan dan kesejahteraan untuk semua “ *development and prosperity for all*”.

Hadirin yang kami hormati,

Sebagai organisasi internasional yang memiliki legitimasi dengan keanggotaan yang universal, Indonesia berpandangan bahwa PBB harus efektif dan memiliki kapasitas untuk mengemban mandatnya.

PBB harus dapat mengakomodasi seluruh kepentingan, baik negara maju maupun berkembang; negara besar maupun negara kecil.

Sepanjang tahun 2010, Indonesia secara konsisten terus terlibat dalam upaya merevitalisasi Majelis Umum PBB, mereformasi Dewan Keamanan PBB agar menjadi lebih representatif dan demokratis, serta mendorong kerja PBB agar lebih terpadu, efektif dan efisien. Hal ini dimaksudkan untuk membantu negara anggota PBB dalam menangani berbagai tantangan tradisional maupun non tradisional yang dihadapi masyarakat internasional saat ini.

Khusus mengenai reformasi DK PBB, sampai tahun 2010, meskipun proses negosiasi telah menyelesaikan 5 kali putaran, namun masih terdapat perbedaan yang tajam di antara negara-negara PBB.

Pada tahun 2011 ini, Indonesia akan kembali berperan aktif dalam proses reformasi PBB yang masih terus berjalan.

Indonesia memiliki keyakinan, dengan reformasi total, PBB dapat memiliki kapasitas lebih besar untuk mengemban mandatnya.

Melalui GNB, dimana Indonesia memiliki sejarah dan pengaruh besar, Indonesia konsisten memperjuangkan kepentingan negara berkembang dalam forum multilateral.

Pada tahun 2011 ini, Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan 118 Menteri Luar Negeri Negara Gerakan Non Blok di Bali.

Pertemuan tersebut juga akan sekaligus memperingati 50 tahun berdirinya Gerakan Non Blok.

Agenda kunci pertemuan tersebut adalah mengkaji peran GNB selama 50 tahun terakhir serta mencanangkan visi GNB 50 tahun kedepan dalam konteks global yang berubah. Indonesia berkeyakinan, sebagai gerakan politik negara berkembang, GNB tetap mampu memberikan sumbangsih konstruktif dalam memecahkan permasalahan global.

Peringatan 50 tahun GNB merupakan momentum untuk merevitalisasi GNB. Kedepan, GNB diharapkan dapat mengkonsolidasi posisi Negara berkembang yang lebih beorientasi pada kemitraan.

Hadirin yang kami hormati,

Sepanjang tahun 2010, Indonesia terus memainkan peran untuk menjadikan OKI lebih relevan bagi kepentingan *Ummah*. Sejalan dengan keyakinan bahwa Islam dan demokrasi dapat hidup berdampingan, maka dalam tahun 2011, Indonesia akan terus mendorong

kerjasama diantara negara OKI dalam berbagai bidang termasuk demokrasi, HAM dan peran wanita di dunia Islam.

Sebagai negara berkembang yang juga anggota G-20, Indonesia akan secara konsisten mengungkap agenda pembangunan di forum multilateral seperti Kelompok 77, APEC dan G-20.

Indonesia akan senantiasa menyuarakan kepentingan pembangunan negara berkembang dan mendorong adanya kemitraan dengan berbagai pihak termasuk mitra negara maju.

Indonesia berkeyakinan, pembangunan dan kesejahteraan adalah milik semua pihak dan hanya dapat dicapai dengan mendorong kerjasama dan kemitraan.

Hadirin yang kami hormati,

Sebagaimana dimaklumi, dalam paruh kedua abad ke-21 ini, dunia dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang bersifat multidimensional dan menuntut adanya kerjasama seluruh negara untuk mengatasinya.

Seluruh permasalahan memiliki dimensi luar negeri. Oleh karenanya, kita harus dapat mengidentifikasi kepentingan nasional pada setiap permasalahan global yang kita hadapi.

Dalam isu lingkungan hidup misalnya, aspek politik luar negerinya sangat kental.

Sepanjang tahun 2010, Indonesia kembali mengukuhkan perannya dalam diplomasi lingkungan hidup global di forum internasional.

Pada bulan Februari misalnya, Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan Sesi Khusus *Governing Council/Global Ministerial Environment Forum UNEP* ke-11 di Bali.

Di sela-sela pertemuan tersebut, Indonesia memprakarsai pertemuan informal tingkat menteri mengenai perubahan iklim, untuk menumbuhkan kembali rasa saling percaya diantara negara pihak pasca pertemuan Kopenhagen di akhir tahun 2009 yang belum mencapai kesepakatan yang mengikat secara hukum.

Selain itu, Indonesia tidak berdiam diri dan menunggu hingga dicapainya komitmen dan kesepakatan internasional dalam kerangka UNFCCC.

Secara sukarela Indonesia menyampaikan komitmen domestik untuk mengurangi emisi dari business as usual sebesar 26% dan 41 % dengan bantuan internasional. Indonesia juga telah melakukan kerjasama dengan Norwegia untuk mengelola hutan secara berkesinambungan melalui penandatanganan *Letter of Intent* mengenai REDD+.

Kerjasama ini bukan hanya mencerminkan komitmen kedua negara untuk mengatasi perubahan iklim, namun juga menjadi contoh kemitraan yang tulus antara negara berkembang dan negara maju untuk secara bersama mengatasi permasalahan dan tantangan global.

Pada tahun 2011 ini, meskipun pertemuan Cancun telah menghasilkan kesepakatan awal, namun kesepakatan dan komitmen yang mengikat secara hukum untuk menggantikan Protokol Kyoto masih belum dicapai.

Indonesia akan bekerja keras dan bekerjasama dengan seluruh pihak untuk terus memelihara momentum positif agar pertemuan COP-17 di Afrika Selatan tahun 2011 ini

dapat menghasilkan kesepakatan yang pada akhirnya dapat menyelamatkan planet bumi dari dampak perubahan iklim.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam isu Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, diplomasi memainkan peran penting dan signifikan.

Untuk mengusung agenda global terkait dengan promosi demokrasi dan Hak Asasi Manusia, diplomasi Indonesia sepanjang tahun 2010 memainkan peran penting. Dalam pertemuan *Community of Democracies* di Krakow, Polandia, misalnya, Indonesia menyuarakan pentingnya demokrasi yang memberikan manfaat nyata bagi kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Demokrasi merupakan sebuah proses yang harus terus ditumbuhkembangkan. Seluruh elemen masyarakat harus memiliki *ownership* dalam mematangkan kehidupan demokrasi.

Diplomasi HAM Indonesia di berbagai fora multilateral semakin mencerminkan komitmen Indonesia yang kuat bagi pemajuan HAM di tingkat global. Pada tahun 2010, Indonesia telah menjadi bagian dari berbagai prakarsa penting di PBB. Sebagai wujud dari komitmen tersebut, pada bulan September 2010 Indonesia telah menandatangani Konvensi mengenai Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.

Sepanjang tahun 2010, Indonesia juga memberikan perhatian besar dalam upaya untuk mengatasi *political development gap* di kawasan. Terdapat keperluan mendesak untuk terus mendorong kesenjangan pembangunan politik sehingga dua aspek, yaitu pembangunan ekonomi dan politik dapat berjalan beriringan.

Untuk itulah secara reguler Indonesia menyelenggarakan *Bali Democracy Forum*. Jika pada tahun 2008 dan 2009, forum ini telah meletakkan fondasi yang kuat bagi pengembangan demokrasi di kawasan, pada tahun 2010 ini forum tersebut telah semakin terkonsolidasi dan menjadi bagian utama arsitektur demokrasi di kawasan.

Hal tersebut tercermin dari jumlah negara dan tingkat delegasi yang berpartisipasi dalam forum tersebut. Pada tahun 2009 misalnya, *Bali Democracy Forum* dihadiri oleh 35 negara peserta dan 13 peninjau. Tahun 2010, *Bali Democracy Forum* dihadiri oleh 42 negara peserta dan 29 peninjau. Pada tahun 2009, 8 menteri hadir dalam pertemuan BDF dan pada tahun 2010 dihadiri oleh 27 ketua delegasi setingkat Menteri.

Pada tahun 2011 ini, Indonesia akan semakin mengukuhkan peran dan kontribusinya untuk mendorong pembangunan ekonomi dan politik di kawasan yang lebih paralel dan seimbang.

Hadirin yang kami hormati,

Pada awal tahun 2011 ini, sejumlah kejadian serangan terorisme kembali mengingatkan kita semua akan bahaya terorisme yang masih membayangi kita semua. Bagi Indonesia, kejahatan terorisme merupakan kejahatan luar biasa/*extraordinary crime* yang menuntut adanya kerjasama internasional.

Berdasarkan perkembangan sepanjang tahun 2010, Indonesia meyakini pentingnya meningkatkan upaya global untuk mempromosikan dialog antar agama dan peradaban.

Hal ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi berbagai tantangan internasional dewasa ini termasuk ancaman terorisme dan ekstrimisme. Dialog juga dapat menjembatani berbagai jurang perbedaan antar negara dan bahkan dalam negara.

Sepanjang tahun 2010, Indonesia, dengan melibatkan masyarakat madani, telah menyelenggarakan beberapa dialog lintas agama, yaitu dengan Amerika Serikat, Austria, Bulgaria, Ceko, Hongaria, Jerman dan Spanyol. Hal ini dilakukan untuk meneguhkan komitmen Indonesia yang akan senantiasa menjembatani antara peradaban.

Hadirin yang saya hormati,

Polugri dan diplomasi memungkinkan kerjasama internasional dalam mengatasi bencana yang saat ini kerap terjadi di berbagai belahan dunia. Sebagai Negara yang terletak di kawasan rawan bencana, Indonesia terus berkepentingan untuk memajukan kerja sama internasional di bidang penanganan bencana.

Selama tahun 2010, kita terus memainkan peran penggerak untuk kerja sama kawasan dalam peningkatan kapasitas respon. Indonesia, bekerjasama dengan badan PBB urusan penanggulangan bencana, pada tahun 2010 telah menyelenggarakan Lokakarya Kemitraan Kemanusiaan di kawasan. Indonesia juga telah menerima kepercayaan untuk menjadi tuan rumah dalam Pertemuan Tingkat Menteri Asia mengenai Pengurangan Resiko Bencana pada tahun 2012.

Hadirin yang kami hormati,

Sebagaimana yang telah kami garisbawahi pada awal tahun 2010, *border diplomacy* merupakan salah satu prioritas Pemerintah RI. Indonesia oleh karena itu telah mengintensifkan upaya untuk memajukan perundingan perbatasan dengan berbagai negara yang memiliki perbatasan langsung dengan Indonesia.

Sepanjang tahun 2010 telah dilakukan 23 kali perundingan perbatasan dengan 7 negara.

Pada tahun 2011 ini, upaya intensifikasi perundingan akan terus ditingkatkan sesuai kepentingan nasional Indonesia.

Hadirin yang saya hormati,

Kementerian Luar Negeri akan terus bekerja keras untuk meningkatkan perlindungan terhadap WNI di luar negeri. Prinsip keberpihakan dan perlindungan WNI menjadi semangat yang melekat dalam setiap individu diplomat Indonesia.

Sebagai catatan, berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Luar Negeri Desember 2010, dari kurang lebih 3.3 juta WNI di luar negeri, maka sepanjang tahun 2010, telah terjadi kasus yang melibatkan kurang lebih 16.000 WNI tersebut, atau 0.49 persen dari jumlah WNI di luar negeri secara keseluruhan.

Juga berdasarkan data yang dimiliki Kemlu, dari 16.000 jumlah kasus termaksud, kurang lebih 90 % telah terselesaikan terhitung Desember 2010.

Tentunya perlu terus diupayakan agar rasio penyelesaian kasus ini dapat terus menerus ditingkatkan.

Kedepan, disamping peningkatan upaya perlindungan WNI di luar negeri, termasuk melalui adanya kesepakatan bidang ketenagakerjaan dengan Negara setempat, diplomasi akan memberikan perhatian khusus terhadap upaya pencegahan dan deteksi dini.

Kedua hal ini tentunya memerlukan upaya penyelesaian yang menyeluruh, dari hilir ke hulu.

Hadirin yang berbahagia,

Sebagai pemikiran akhir, kami menyadari betul, bahwa politik luar negeri hanya akan efektif jika terdapat rasa kepemilikan dan partisipasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

Dengan parlemen, konsultasi baik secara formal maupun informal senantiasa dilakukan dan akan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Media massa juga memegang peranan penting.

Dalam era saat ini, media merupakan pilar politik luar negeri dan diplomasi.

Kami sangat menghargai kerjasama yang baik yang telah terjalin selama ini. Kami juga menyampaikan ucapan selamat bagi rekan-rekan media yang tahun ini mendapatkan Adam Malik Award.

Kami percaya kerjasama yang telah terjalin ini dapat ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Adalah keniscayaan bahwa politik luar negeri Indonesia dan diplomasi merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa.

Hanya dengan kerja keras seluruh elemen bangsa, kita dapat membawa Indonesia memiliki peran dan pengaruh yang lebih besar diawasannya.

Hanya dengan itu pula, Indonesia dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam forum global.

Hanya dengan itu pula, politik luar negeri dan diplomasi Indonesia dapat diabdikan untuk kepentingan nasional.

Guna mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Sekian dan terima kasih,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.